

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Penelitian

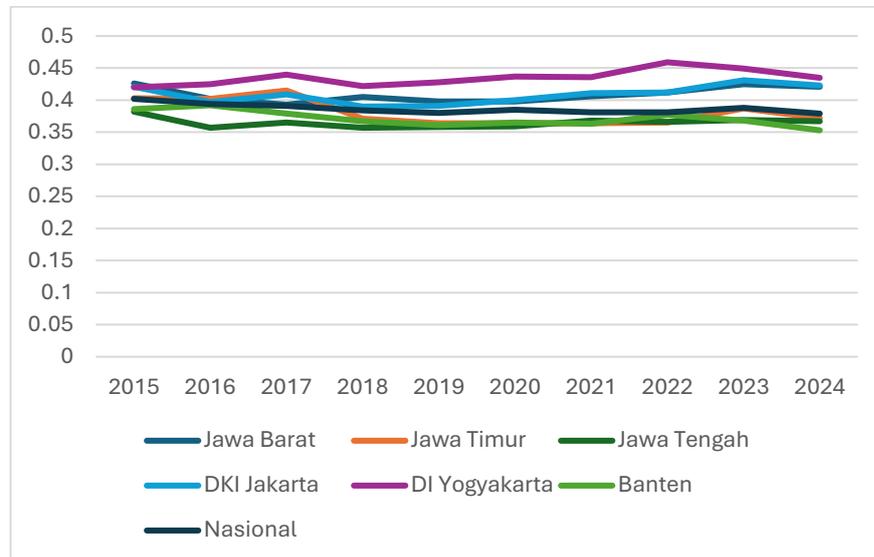
Ketimpangan pendapatan selalu menjadi salah satu isu ekonomi yang mendapat perhatian di berbagai negara, termasuk Indonesia. Ketimpangan di Indonesia umumnya terjadi di wilayah pedesaan dan perkotaan, di Pulau Jawa dan luar Pulau Jawa, serta di Indonesia Timur dan Indonesia Barat (Bappenas, 2016). Berlanjutnya ketimpangan regional tersebut tentu dapat mempengaruhi stabilitas perekonomian di wilayah-wilayah yang terdampak. Tingginya ketimpangan mencerminkan ketidakmerataan pendapatan, yang semakin memperlebar kesenjangan kesejahteraan antara kelompok berpenghasilan tinggi dan rendah. Selain itu, istilah ketimpangan pendapatan lebih umum dikenal oleh masyarakat dibandingkan dengan ketidakseimbangan dalam distribusi pendapatan. (Sarfhah & Yustirania Septiani, 2019).

Menurut Fitriyani et al., (2024) ; World Bank, (2024) ada beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan di suatu wilayah yaitu akses infrastruktur yang tidak merata antar wilayah, jumlah penduduk miskin, PDRB sektor pertanian, pendidikan, persentase pekerja sektor jasa, dan kesehatan. Ketimpangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan di antar wilayah akan berdampak pada rendahnya kualitas sumber daya manusia karena menghambat peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja yang pada akhirnya memperburuk ketimpangan ekonomi secara keseluruhan. (Jones & Pratomo,

2016) Selain itu, Infrastruktur yang tidak merata antar wilayah membatasi akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi. Ketidaksetaraan ini seringkali disebabkan oleh konsentrasi pembangunan di kota-kota besar, sementara daerah pedesaan atau terpencil kurang mendapatkan perhatian yang sama. (Asian Development Bank, 2020).

Pulau Jawa, sebagai pusat perekonomian dan wilayah dengan populasi terbesar di Indonesia, mencatat 55,93% dari total penduduk Indonesia atau sekitar 157,39 juta jiwa dari 281,6 juta jiwa pada tahun 2024, dengan wilayah administratif terbagi menjadi enam provinsi, termasuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur serta berkontribusi sebesar 57,70% terhadap PDB nasional (BPS, 2024). Namun ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa justru lebih tinggi dibandingkan nilai ketimpangan pendapatan nasional. Fenomena ini semakin kompleks dengan adanya pandemi COVID-19 yang memberikan dampak signifikan pada berbagai aspek kehidupan, termasuk pada peningkatan ketimpangan di suatu wilayah (Aspachs et al., 2021; Furceri et al., 2022). Peningkatan ketimpangan tersebut terwujud dalam nilai koefisien Gini yang menjadi parameter untuk menilai distribusi pendapatan suatu wilayah dengan rentang 0 hingga 1. Jika rasio Gini mendekati 1, distribusi pendapatan sangat timpang, sedangkan jika mendekati 0, distribusi pendapatan merata (Todaro & Smith, 2006). Berikut data rasio gini di Pulau Jawa dan nasional:

**Grafik 1. 1 Gini Rasio Pulau Jawa dan Nasional**

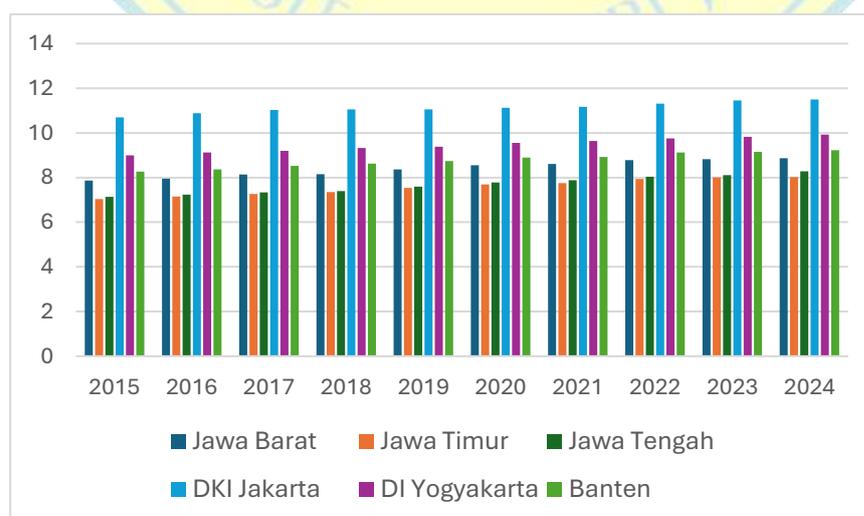


Sumber: Badan Pusat Statistik (2024).

Dari grafik 1.1 dapat diketahui bahwa data koefisien gini di Pulau Jawa yang dipublikasikan oleh BPS pada tahun 2015 - 2024 dinilai cukup fluktuatif setiap tahunnya. Terkhusus pada beberapa provinsi di Pulau Jawa seperti DKI Jakarta, Jawa Barat, dan D.I. Yogyakarta, memiliki nilai koefisien Gini yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Rata-rata koefisien Gini di Pulau Jawa tercatat sebesar 0,405, sementara rasio Gini nasional hanya mencapai 0,388 di tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa lebih mencolok apabila dibandingkan dengan rata-rata nasional. Selain itu, adanya pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak awal 2020 memberikan dampak bertambahnya dimensi baru pada dinamika ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Sebagai wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia, Pulau Jawa menghadapi dampak signifikan yang meluas ke sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

Fenomena ini berdampak signifikan pada pendidikan, yang merupakan faktor utama dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan yang baik memberikan keterampilan dan pengetahuan untuk mendukung pencarian pekerjaan sesuai kompetensi, serta berpotensi meningkatkan pendapatan (Sanggolongan et al., 2015) Namun, kebijakan pembatasan sosial dan transisi ke pembelajaran daring selama pandemi memperburuk kesenjangan akses pendidikan serta menghambat pencapaian tingkat pendidikan yang optimal. Dalam konteks ini, kinerja dan tingkat pendidikan suatu wilayah dapat diukur menggunakan indikator rata-rata lama sekolah (RLS). RLS menggambarkan rata-rata jumlah tahun yang ditempuh oleh penduduk dalam pendidikan formal tanpa menghitung waktu pengulangan. Data RLS di enam provinsi cenderung meningkat setiap tahunnya, akan tetapi masih terdapat perbedaan pencapaian tingkat pendidikan. Hal ini terlihat dari grafik di bawah ini yang digambarkan pada tahun 2015 – 2024.

**Grafik 1. 2 Rata – Rata Lama Sekolah di Pulau Jawa (Tahun)**



Sumber: Badan Pusat Statistik (2024).

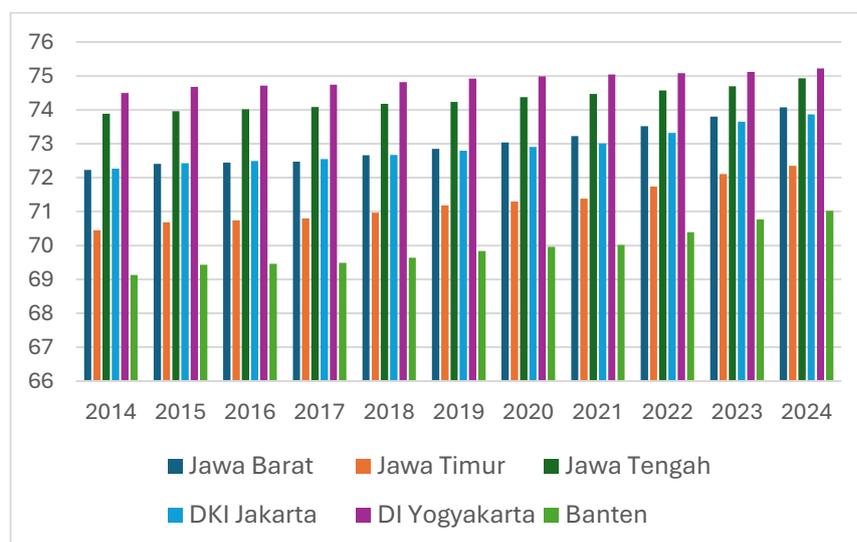
Berdasarkan grafik 1.2 di tahun 2024, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten rata-rata lama sekolah masyarakatnya selama 10.21 tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata masyarakatnya lulus pada tingkat pendidikan di jenjang SMP. Sementara itu, Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, hanya sebesar 8,39 tahun. yang mengindikasikan rata-rata tingkat pendidikan masyarakatnya setara dengan jenjang SD.

Hal ini mencerminkan adanya ketimpangan pendidikan di Pulau Jawa yang semakin diperburuk dengan adanya pandemi COVID-19, terutama saat pelaksanaan pembelajaran jarak jauh dilakukan. Provinsi dengan rata-rata lama sekolah (RLS) rendah, seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah, menghadapi kendala besar, seperti keterbatasan perangkat teknologi dan akses internet, yang membuat pembelajaran daring kurang efektif. Sebaliknya, DKI Jakarta, DI Yogyakarta, dan Banten, dengan RLS lebih tinggi, mampu mengelola pembelajaran jarak jauh dengan lebih baik berkat dukungan infrastruktur yang memadai (Anggraeni et al., 2022). Ketimpangan ini berisiko memperlebar kesenjangan pendidikan dan membatasi peluang generasi muda di wilayah kurang maju.

Selain pendidikan, faktor kesehatan juga memainkan peran penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memiliki peran penting dalam meningkatkan produktivitas. Hal ini didasarkan pada teori modal manusia (*human capital*) Gary Becker (1993), yang menjelaskan bahwa Pendidikan dan Kesehatan berpotensi untuk menurunkan ketimpangan serta dapat meningkatkan produktivitas masyarakat. Menurut Badan Pusat Statistik (2019)

melalui peningkatan kualitas manusia melalui pembangunan manusia bertujuan agar masyarakat mempunyai banyak pilihan dalam hal pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Pembangunan manusia dapat terlihat dari tiga dimensi yakni kesehatan, pendidikan, serta pendapatan per kapita (United Nations Development Programme, 1990). Dan untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kesehatan masyarakat, dapat diukur menggunakan Umur Harapan Hidup (UHH), yang menggambarkan dimensi umur panjang dan hidup sehat, terkait erat dengan faktor seperti asupan nutrisi dan kesehatan. Berikut ini adalah grafik tentang UHH di Pulau Jawa pada tahun 2015 - 2024.

**Grafik 1. 3 Umur Harapan Hidup (Tahun)**



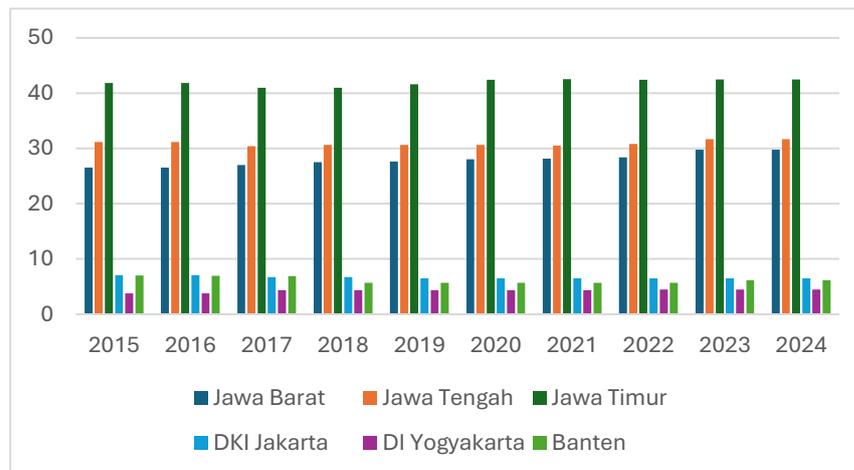
Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2024).

Dari grafik tersebut diketahui bahwa rata – rata Umur Harapan Hidup (UHH) penduduk di Pulau Jawa cenderung meningkat. Namun nilai Umur Harapan Hidup di salah satu provinsi Pulau Jawa mengalami penurunan seperti di provinsi Jawa barat yang di tahun 2022 data UHH nya sebesar 73.52 akan

tetapi di tahun 2023 datanya hanya sebesar 73.8. Keadaan ini disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang mengganggu kesehatan, menyebabkan lonjakan kasus infeksi dan kematian, serta menghambat akses layanan kesehatan. Pandemi juga memicu krisis ekonomi, memperburuk ketimpangan kesehatan dan pendapatan, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah terpencil karena keterbatasan infrastruktur.

Infrastruktur memiliki peran krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, karena ekonomi yang berkembang memerlukan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dan kemajuan ekonomi saling mendukung (Calderón & Servén, 2004). Dan perbedaan infrastruktur antar wilayah menjadi salah satu faktor penyebab ketimpangan yang berdampak pada tingkat kesejahteraan masyarakat (Sukwika, 2018). Untuk itu menurut Iqbal et al. (2019), Penyediaan infrastruktur yang memadai dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang stabil serta menciptakan lapangan kerja baru dan meningkatkan pendapatan per kapita. Pembangunan infrastruktur jalan juga meningkatkan efisiensi, memperlancar distribusi barang dan jasa, menekan biaya, serta mempermudah akses masyarakat dalam beraktivitas. Ketersediaan infrastruktur yang baik meningkatkan produktivitas, seperti bertambahnya jalan raya di Pulau Jawa yang mendukung mobilitas masyarakat hal ini dapat dilihat pada grafik 1.4.

**Grafik 1. 4 Panjang Jalan Pulau Jawa (km)**



Sumber: Badan Pusat Statistik Nasional (2024)

Data pada grafik 1.4 menunjukkan bahwa panjang jalan pada 10 tahun kebelakang (2015-2024) di wilayah provinsi Pulau Jawa cenderung berfluktuatif. Provinsi yang memiliki panjang jalan terpanjang dicapai oleh Provinsi Jawa Timur dengan nilai rata – rata dari tahun 2015 -2024 adalah 41.91. Sedangkan provinsi yang memiliki panjang jalan terendah adalah DI Yogyakarta dengan dengan nilai rata-rata dari tahun 2015-2024 yaitu 4.27. Untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antar daerah, diperlukan intervensi aktif dari pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Implementasi kebijakan pemerintah menjadi faktor krusial dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, yang pada akhirnya akan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan ekonomi secara menyeluruh (Dhyatmika & Atmanti, 2013)

Pada penelitian Sugiyanto & Pamungkas, (2023) ditemukan bahwa pendidikan dengan data rata-rata lama sekolah dan kesehatan dengan data Angka Harapan Hidup mempunyai pengaruh yang signifikan dan negatif

terhadap ketimpangan pendapatan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sri Indriyani S Dai, Syarwani Canon dan Devi Oktaviani Bauty, (2023) secara parsial Rata - Rata Lama Sekolah berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap ketimpangan distribusi pendapatan, Lalu untuk Umur Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap ketimpangan pendapatan. Pada penelitian Siswanto (2024) menemukan bahwa kedua variabel tersebut tidak memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan namun penelitian yang dilakukan oleh Mehdi Zolfaghari, Mahbobe Kabiri dan Hamideh Saadatmanes, (2020) ditemukan bahwa infrastruktur, pendidikan dan kesehatan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan pendapatan. Dan penelitian yang dilakukan oleh Yousef Makhlof dan Christopher Lalley,(2023) bahwa pendidikan memiliki pengaruh terhadap ketimpangan terutama dalam jangka panjang pada saat pandemi COVID-19 namun tidak dalam jangka pendek.

Berdasarkan pada uraian permasalahan, konsep dan latar belakang di atas, peneliti menilai perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai ketimpangan pendapatan yang terjadi di Pulau Jawa khususnya sebelum, saat, dan setelah Pandemi COVID-19. Oleh karena itu, peneliti berencana untuk melakukan penelitian dengan judul yang dapat menggambarkan bahwa kesenjangan pendapatan antar daerah dipengaruhi oleh perbedaan akses dalam memperoleh kualitas hidup yang lebih baik, serta ketidakmerataan dalam kualitas sumber daya manusia. Selain itu, daerah dengan akses lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, dan lapangan pekerjaan cenderung memiliki pendapatan yang lebih tinggi, sementara daerah yang kurang berkembang infrastrukturnya terus

tertinggal, sehingga memperlebar jurang ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa. Oleh karena itu peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat Pendidikan, Kesehatan, Infrastruktur dan Pandemi COVID - 19 Terhadap Ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa periode tahun 2015 – 2024.**

## **1.2 Pertanyaan Penelitian**

Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai pengaruh pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa periode 2015 - 2024 dengan pandemi COVID-19 sebagai variabel dummy, mengingat adanya perbedaan hasil dari penelitian sebelumnya. Beberapa pertanyaan yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

1. Apakah adanya pengaruh Pendidikan terhadap ketimpangan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024?
2. Apakah adanya pengaruh Kesehatan terhadap ketimpangan Pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024?
3. Apakah adanya pengaruh infrastruktur terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024?
4. Apakah adanya pengaruh pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024?
5. Apakah adanya pengaruh secara simultan antara pendidikan, kesehatan, Infrastruktur dan pandemi COVID-19 mempengaruhi

tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015 – 2024?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Selaras dengan tujuan dengan latar belakang dan pertanyaan penelitian, tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui pengaruh Pendidikan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.
2. Untuk mengetahui pengaruh Kesehatan terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.
3. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.
4. Untuk mengetahui pengaruh pandemi COVID-19 terhadap tingkat ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa tahun 2015 - 2024.
5. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pandemi COVID-19 terhadap ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa pada periode 2015–2024.

### 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang terbagi menjadi dua bagian, yaitu manfaat secara teoritis dan praktis. Adapun kegunaan secara teoritis dan praktis sebagai berikut:

#### 1.4.1 Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan literatur mengenai hubungan antara pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan pandemi COVID-19 dengan ketimpangan pendapatan, khususnya di Pulau Jawa. Penelitian ini juga bertujuan untuk menjelaskan bagaimana ketiga faktor tersebut berperan dalam mengurangi ketimpangan pendapatan dan mendukung pemerataan distribusi pendapatan.

#### 1.4.2 Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang efektif untuk mengurangi ketimpangan pendapatan di Pulau Jawa serta merencanakan langkah-langkah yang lebih tepat guna untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pendapatan di berbagai daerah.

*Intelligentia - Dignitas*